

## **SINOPSIS**

Otonomi Daerah yang semakin menguat telah membawa dampak pada penguatan posisi Pemerintahan Desa. Secara formal telah diletakkan dasar-dasar Pemerintahan Desa, baik dari bentuk, struktur pemerintahan, sumber-sumber keuangan serta fungsi-fungsi pemerintahannya. Demikian pula proses pembentukan lembaga-lembaga yang baru mengarah pada mekanisme pemerintahan yang demokratis. Kekuasaan eksekutif dijabat oleh Kepala Desa dan perangkatnya yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa di Pemerintahan Desa memegang kekuasaan legislatif yang bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa. Penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Analisis Pola Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa” karena ingin mengetahui sejauh mana pola hubungan tersebut yang selama ini dilihat kurang adanya keterbukaan antara Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa dan sebuah pola hubungan Kepala Desa dan BPD sendiri berpengaruh pada lancar atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan.

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. data yang dibutuhkan berupa Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan , wawancara, dokumentasi guna mendukung data yang lebih akurat terhadap pola hubungan Kepala Desa dan BPD. Dan teknik analisa data yang digunakan yakni kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka pola hubungan Kepala Desa dan BPD Lebeng dibuktikan dalam pembuatan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan juga dalam pembanguana, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan tersebut adalah kualitas Kepala Desa dan BPD, kedekatan hubungan antara Kepala Desa dan anggota BPD, kewenangan yang dimiliki masing-masing.

Pola hubungan antara Kepala Desa dan BPD dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa Lebeng yaitu pola hubungan Idealis, dimana menunjukan Kepala Desa Lebeng tingkah laku politik cenderung mengambil jarak dengan BPD Lebeng. Namun agar dapat mewujudkan seluruh pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa bisa lebih baik perlu

SINOPSIS

Autonomi Daerah yang semakin meningkat telah membawa dampak pada perubahan posisi Pemerintahan Desa. Secara formal telah dilakukan dasar-dasar Pemerintahan Desa baik dari bentuk struktur pemerintahan sumber-sumber keuangan serta fungsi-fungsi pemerintahannya. Demikian pula proses pembentukan lembaga-lembaga yang baru mengarah pada mekanisme pemerintahan yang demokratis. Kelembagaan eksistensi dijabar oleh Kepala Desa dan perannya yang berwujud menjalankan roda pemerintahan di desa. Sedangkan Badan Penyelenggaraan Desa di Pemerintahan Desa merupakan karyasana legislatif yang bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa. Penelitian ini berwujud skripsi dengan judul "Analisis Pola Hubungan Kepala Desa dan Badan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Karena ini merupakan sebuah mata pelajaran tersendiri yang selama ini dilihat kurang adanya ketertarikan antara Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa dan seolah pola hubungan Kepala Desa dan BPD sendiri berpengaruh pada lancar atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan.

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif yaitu dengan mengklasifikasi data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yang dibuktikan berupa Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara, dokumentasi guna mendapatkan data yang lebih akurat terhadap pola hubungan Kepala Desa dan BPD. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka pola hubungan Kepala Desa dan BPD lebih dibuktikan dalam pembangunan Pemerintahan Desa. Artinya Pembangunan Pola Hubungan Desa dan juga dalam pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan tersebut adalah kualitas Kepala Desa dan BPD, kedekatan hubungan antara Kepala Desa dan anggota BPD, keragaman yang dimiliki masing-masing.

Pola hubungan antara Kepala Desa dan BPD dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Lebih yaitu pola hubungan idealis dimana menunjukkan Kepala Desa lebih tingkat laku politik cenderung mengabdikan jasa dengan BPD. Namun agar dapat mewujudkan seluruh pembangunan desa bisa lebih baik perlu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa bisa lebih baik perlu sering diadakan tetap maka antara Kepala Desa dan anggota BPD dan dengan peningkatan sumber Daya Manusia.